

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. Teori Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2011 : 7).

Menurut Musanef dalam Syafiie (2015 : 11) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

menurut (Syafiie, 2011 : 11) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepemimpinan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

2. Pemerintahan dan Pemerintah

a. Pemerintahan

Perspektif kybernologi dalam (Ndraha : 2011) pemerintahan didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer (produk-produk pemerintahan), akan pelayan public dan pelayanan civil; nadan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola, provider)-nya disebut pemerintah; consumer produk-produk pemerintahan disebut yang-diperintah;

hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan-pemerintahan; personil pemerintah disebut actor pemerintahan; dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan. Perlu yang diketahui yang dimaksud dengan produk pemerintahan itu adalah keseluruhan output (OP) yang terjadi melalui proses (TP), baik yang positif maupun yang negative, dan outcome (OC) adalah semua yang dialami oleh atau pengalaman manusia (consumer) dari produk pemerintahan yang bersangkutan. Jadi kybernologi adalah ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk pemerintahan, akan pelayanan public dan pelayanan civil, dalam hubungan pemerintahan.

Pemerintahan adalah suatu system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil (Ndraha 2011 : 5) . Senada dengan Ndraha, Syafiie dalam bukunya (2011 : 8) mengatakan pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerinthan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas) .

Selanjutnya syafiie (2011 : 8) pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paing sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saing memiliki hubungan, pihak yang memerintahmemiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang menguruspelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas selain eksekutif

pemerintahan termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) . (Syafiie, 2011 : 8) .

Secara etimologi, Syafiie (2015 : 8) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungannya.
2. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah “-an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, atau perihal.

Nurcholis dalam bukunya “pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa” (2011 : 73) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) . pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
 2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam penyenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirai masyarakat. (dalam Nurcholis : 2011)

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paing sedikit 5 (lima) orang dan paing banyak 11(sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuanagn desa. (dalam Nurcholis : 2011) .

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari bahasa Yunani “kubernan” atau nakhoda kappa artinya, menetapkan kedepan lalu “memerintah” bearti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara maupun tujuan masyarakat pada masa yang akan dating, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengeragkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan dalam Supriyatno (2009 : 21) .

Selanjutnya, menurut jo Ann G. Ewalt dalam Awang dan Mendra Wijaya (2012 : 11) berpendapat, governance indentifies the power invoved in the relationship between institution in volved in collective action. Organization are dependent upon each other for the achievenmentof collection action, and thus must echange resources and negotoative shared understandings of ultimate program goals. Artinya adalah pemerintahan mendefenisikan ketergantungan daya yang terlihat dalam hubungan antara lembaga yang terlihat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif, dan dengan demikian tentannng ada

pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut) .

b. Pemerintah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses layanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada setiap diperlakukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Ndraha, 2011 : 6) . Selanjutnya Ndraha (2011:74) menyebutkan berbagai konsep (defenisi) tentang pemerintah :

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam UUD (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misanya Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislative dan fungsi eksekutif. Bahkan pada presiden dilimpahkan “concertration of power and responsibility” .
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi . Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melaluipemilihan oleh lembaga perwakilan . Birokrasi dapat dianggap serta dengan, tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

6. Pemerintah dalam arti pelayan, diambil dari konsep civil servant, diisi pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan (pembeli) .
7. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya di hadapkan pada konsep pemerintahan daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintahan daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, kaeran daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batsnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dengan Negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi , contohnya Indonesia dibawah undang-undang 5/74tentang pokok-pokok pemerintahandidaerah, kekuasaan (urusan) pusat di daerah dekelola oleh pemerintah wilayah.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri. Konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan belanda (binnenlandsbestuur, BB, pamong praja) dibahas secara panjang lebar oleh bayu surianingrat dalam mengenal ilmu pemerintahan (1980,16-38) .
11. Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua pemerintahan adalah semua lembga yang dianggap mampu (normative)atau secara empiric memproses jasa public dalam layanan civil.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban didalam masyarakat bias msyarakat bias menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnyademi kemajuan bersama.

Ndraha dalam bukunya (2011 : 76) menyatakan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatkan kondisi ekonomi, politik dan sosia masyarakat. Semakinmeningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintahan. Kemudian fungsi sekunder pemerintahan adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik dan social yang diperintah. Hal ini diartikan bahwa semakin integrative masyarakat yang diperintah semakin bekurang fungsi sekunder pemerintah.

Selanjutnya Syafiie (2009 : 21) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni, dikatakans eni karena berapa banyak pimpinan pemerintah yang tanpa pendidikanpemerintah mampu berkiat serta berkhariematik menjalankan roda pemerintahan sedangkan dikatakan ilmu pemerintahan adalah karena memenuhi syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek, baik itu material maupun objek formal.

3. Kewajiban

Menurut Notonegoro dalam (<http://elandaharviyata.wordpress.com/2003>) kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya beban untuk memberikan sasuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu secara paksa oleh yang berkepentingan. Kemudian kata wajib itu ditambah dengan awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kewajiban yang artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Menurut Curzon dalam (<http://hasanboby9.wordpress.com/2013>) kewajiban dikelompokan menjadi 5 yaitu :

1. Kewajiban mutlak, tertentu kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak dilain pihak.
2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian dengan hak perdata.
3. Kewajiabn politik, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.
4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga Negara atau cara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.
5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misa kewajiabn untuk tidak mencemarkan nama baik kewajiaban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum missal membayar kerugian dalam hukum perdata.

Menurut Ndraha (2011 : 86) menjelaskan yang dimaksud dengan kewajiabn adalah kewajiabn bias lahir dari perintah, seseorang yang mendapat tugas wajib menjalankan tuhas dengan sebaik-baiknya, ada tiga sumber kewajiaban yaitu : janji atau commitment, status, dan perintah (mandat) . pemerintah berkewajiban melayani masyarakat karena status sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan nyata dan langsung.

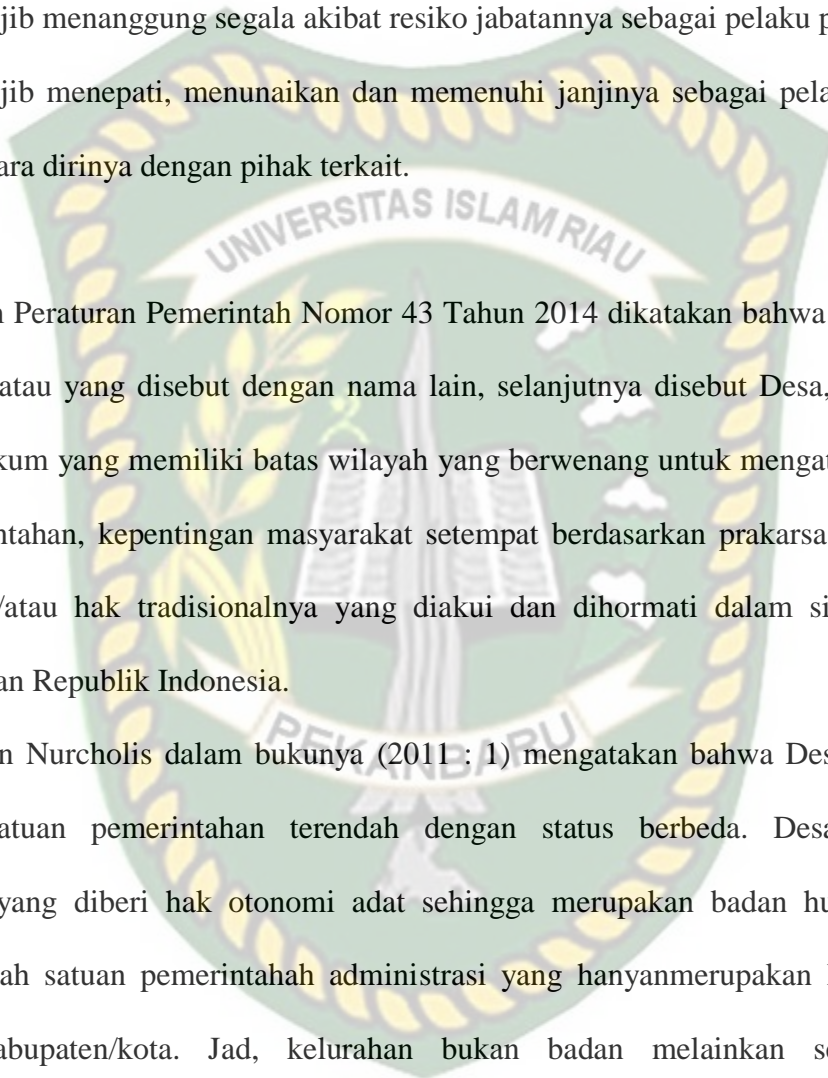
Menurut Ndraha (2011 : 90) telah ditemukan bahwa kewajiabn (obligation) lahir dari tiga sumber yaitu perintah, janji dan status. Perintah harus ditaati, janji harus dipenuhi, ditepati, dan ditunaikan, dan konsekuensi status adalah kewajiabn untuk berbuat kebijakan terhadap orang lain. Selanjutnya Ndraha (2011: 116) obligation (kewajiabn) yaitu tanggung jawab seseorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga Negara dan sebagai pelaku pemerintah. Dalam hubungan ini ada empat aspek (dimensi) kewajiabn :

- a. Pemerintah wajib menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik seutuhnya dalam masyarakat.
- b. Wajib membedakan mana jabatan mana pribadi, dan tidak boleh mencampurkan keduanya.
- c. Wajib menanggung segala akibat resiko jabatannya sebagai pelaku pemerintahan.
- d. Wajib menepati, menunaikan dan memenuhi janjinya sebagai pelaku pemerintahan antara dirinya dengan pihak terkait.

4. Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Nurcholis dalam bukunya (2011 : 1) mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan melainkan sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.



Menurut Soetardjo dan Yuliati (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007 : 7) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berate tempat asal, tempat tinggal, negeri asa atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan suatu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan defenisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemukan banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti dusun dan marga bagi masyarakat sumatera selatan, dati di Maluku, nagari diminang atau wanua di minahasa. Pada daerah ini masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Pengertian desa juga dapat dilihat dari pergaulan hidup, menurut Bouma (dalam Wasistiono dan Tahir 2007 : 8) mendefenisikan desa “ sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saing mnengena, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah social” .

Lain halnya dengan Bouman yang memandang desa dari segi pergaulan hidup, Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007 : 9) yang memandang desa dari segi geografi mendefenisikan desa sebagai “suatu hasil dari perwujudanantar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social ekonomis, politis dan kultural yang saing berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain” .

Kemudian masih menurut Bintarto, usnur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (rural society) .

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup atau “ living unit” . maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (human effort) dan tata geografis (geographical setting) . Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “human effort” untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap-tiap daerah mempunyai “geographical setting” dan “human effort” yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dari tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Selanjutnya, Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir 2007 : 10) menjelaskan bahwa “desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politi, ekonomi, memiliki kekayaan dan jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri” . Selanjutnya, masih menurut Sunardjo susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu:

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada territorial / wilayah tempat bersama sebagai tempat utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau caon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (territorial dan keturunan)

Demikian pula yang dikemukakan Sutardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2007 : 9) bahwa bentuk desa didasarkan atas 3 (tiga) sifat, yakni :

1. Berdasarkan geneologis / keturunan (*genealogische rechtgemeenschappen*) .
2. Berdasarkan territorial / wilayah (*teritorialle rechtgemeenschappen*) .
3. Campuran antar geneologis dan territorial .

Kemudian, Departemen Dalam Negeri sebagaimana termasuk dalam pola dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (dalam Wasistiono dan Tahir 2007 : 8) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatan didalam susunan tertib pemerintah, sebagai berikut: “Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susuna asli adalah suatu “badab hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya” .

Defenisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dipilih tinjauan sudut pandang suatu daerah misanya : di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah” buat daerah hukum yang paling bawah. Didaerah bataj disebut “kuta” atau “Huta” di minangkabau dinamakan “Nagari” di sumatera

timur dinamakan “dusun” atau “Tiuh” didaerah minahasa dinamakan “Wanua”, sedangkan diujung padang diberi dengan “Gaukang” .

Susunan desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 tipe (Unang Sunardjo, 1984) yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada territorial /wilayah tempat sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetic sebagai dasar utama untuk dapata bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan asas campuran (territorial dan keturunan) .

Menurut Soehartono (2000 : 12) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

Selain itu Berger (dalam Rahardjo 1995 : 121) , juga berpendapat tentang desa yang dikutip dari bukunya yang berjudul pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian, yaitu :

Desa adalah setiap pemukiman para petani (peasant) sebenarnya factor pertanian bukanlah ciri yang khas harus terletak pada setiap desa.Ciri utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu.keterkaitan terhadap wilayah ini disamping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka.

5. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja, 2010 :165) .

Dengan demikian, desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaigus memberi landsan yang kuat bagi terwujudnya “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan akan tetapi justru sebaliknya desa merupakan “Independent Community” yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut:

1. Memberi akses dan kesempatan pada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya didesa melalui

pembinaan dan pengawasan, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise (Widjaja, 2010 :164) .

Menurut Ndraha dalam Nurcholis (2011 : 21) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa.
3. Memilih kepala desa.
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.
5. Memiliki tanah sendiri
6. Menggali dan menetpkan sumber-sumber keungan desa sendiri
7. Menyusun APPKD (Anggran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa)
8. Menyelenggarakan gotong royong
9. Menyelenggarka peradilan desa
10. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Nugroho dalam skripsi saddam (2015 :19) konsep otonomi secara terminology adalah suatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu *autos* dan *nomos* .kata pertama bermakna sendiri dan kaya kedua bermakna perintah atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi memerintah sendiri, sementara daerah seringkali diartikan sebagai *local stage government*. Dengan demikian makna dari otonomi daerah adalah wacana administrasi publik disebut sebagai *local self government* yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dimana system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa. Pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan otonomi desa neburut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tang dilaksanakan dalam koridor peraturan undang-undang yang berlaku.

6. Teori Pembinaan

Pembinaan menurut Santoso dalam skripsi Iskandar (2014 :22) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk anatar lain :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina dan apa yang dibina.

Selanjutnya Thohs dalam Skripsi Iskandar (2014 :22) pembinaan sebagai suatu tindakan proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan evakuasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa

tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu bias menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Thoha dalam Skripsi Iskandar (2014:24) mendefenisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menggabungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan penerima akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna. Lebih lanjut Ismail menyatakan bahwa tata cara membina adalah:

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya relative rendah. Dalam media cetakhendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima baik menafsir.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari suatu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan kerumah.
3. Dengan melakukan pertunjukan atau demonstrasi. Pertunjukan atau seseorang adalah sautu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu ha yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang yujuannya khusus memberikan penerangan.

Menurut Santoso dalam Skripsi Iskandar (2014:25) mengemukakan bahwa pembinaan adalah “usulan, memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan.

7. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah gejala sosial. Kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga (agar) perilaku orang lain itu berubah atau tetap, interaktif (Ndraha, 2011: 216) .

Sedangkan menurut Syafie dalam bukunya “Ilmu Pemerintahan” (2015:105) mengatakan secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Berasal dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa Inggris lead) berarti membimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam).
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris leader) berarti orang yang memengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengapal. Antara pemimpin dengan pimpinan dapat dibedakan menjadi yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otoriter, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.
4. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa Inggris leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam memengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Selanjutnya, Cooley dalam Syafiie (2015 : 106) mengatakn bahwa “the leader is always the nucleus or tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to concist of tendencies having such nucleus” . Maksudnya pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan social kalau diamati cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat .

Teard dalam Syafiie (2015: 106) mengatakn bahwa kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Cleeton dan Mason dalam Syafiie (2015:106) berpendapat bahwa kwpwmimpinan menunjukkan kemampuan memengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui imbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.

Selanjutnya, Stodgill dalam Syafiie (2015 : 106) menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan defenisi kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok
2. Kepemimpinan sebagai kepribadian ang beraakibat
3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi
5. Kepemimpinan sebagai tindakan pperilaku
6. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan
9. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi
10. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur

Stoner dalam Pasolong (2008:4) mengatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Selanjutnya, Rost dalam Pasolong (2008:5) mengatakan kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) dengan tujuan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.

Stodgill dalam Pasolong (2008 :12) mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berfikir atau verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai.
1. Prestasi atau Tanggung jawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul.
2. Partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosiaibilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor.
3. Status, yaitu memiliki kedudukan social ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar.
4. Achievement, yaitu gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan perolehan dalam olahraga dan atletik, dan lain-lain.

Selanjutnya, Maxwell dalam Pasolong (2008:12) memberikan rujukan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Cara paing baik untuk memiliki loyalitas personil ialah dengan memperlihatkan kepada perhatian kepada mereka dengan kata-kata dan perbuatan.
2. Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar bawahannya
3. Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan perencanaan
4. Pemimpin yang baik mampu menghindari tujuan dosa yang mematikan, yaitu:
 - a. Berusaha untuk disukai bukan dihormati
 - b. Tidak minta nasihat dan bantuan kepada orang lain
 - c. Mengesampingkan bakat pribadi dengan menekan peraturan bukan keahlian
 - d. Tidak menjaga untuk dikritik tetap kontrustif

- e. Tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain
- f. Memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama
- g. Tidak memnuat orang selalu mendapat informasi

Sedangkan, Panikkan dan Wirjana (dalam pasolong, 2008:13) mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik adalah:

1. Memberi tekanan/focus pada masa depan
2. Menekankan atau focus pada penentuan arah
3. Pertanyaan selalu “apa yang akan terjadi”
4. Memberikan visi dan inspirasi
5. Memimpin orang-orang
6. Tidak membuat orang selalu mendapat informasi

Kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk birokrasi sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pendapat Davis dalam Pasolong (2008 :18) yang mengatakan bahwa tanpa pemimpin, suatu organisasi adalah kumpulan orang-orang dan mesin-mesin yang tidak teratur dan kacau balau. Sedangkan menurut Kartasmita dalam Pasolong (2008:18) mengatakan bahwa kepemimpinan sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh banggunya bangsa ditentukan oleh pemimpinnya.

Selanjutnya, menurut Maxwell dalam Pasolong (2008:19) kepemimpinan merupakan suatu yang sangat urgent karena:

Pertama, tidak ada satu factor pun memberikan lebih banyak manfaat terhadap organisasi selain dari pada kepemimpinan yang efektif, pemimpin diperlukan untuk menentukan tujuan, mengalokasikan sumber daya, memfokuskan kepada perhatian pada tujuan, mengkoordinasikan perubahan, membina hubungan dengan pengikutnya. *Kedua*, bukti lain dapat dipetik pentingnya kepemimpinan adalah mengapa suatu organisasi ketika dipimpin oleh pemimpin tertentu cukup berhasil, namun ketika diganti pemimpin lain tidak berhasil meningkatkan kinerja organisasi. *Ketiga*, biaya untuk kepemimpinan sangat mahal.

Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu birokrasi ingin sukses. Terlebih lagi pegawai-pegawai yang baik, selalu ingin bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan birokrasi, untuk membangkitkan gairah pada pegawai memerlukan tujuan-tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan birokrasi. Jadi birokrasi yang berhasil memiliki satu sifat lain yang tidak berhasil. Sifat dan ciri umum adalah tersebut adalah kepemimpinan dalam birokrasi itu sendiri.

Menurut Hamid dan Indra Muchlis Adnan (2005 : 194) kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan.

Kemudian dalam Soekanto (2007 : 250) kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain, (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

8. Teori Wewenang

Menurut Hasibuan (2014:4) wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Tanpa ada wewenang terhadap suatu pekerjaan, janganlah mengerjakan pekerjaan tersebut, karena tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukannya. Wewenang merupakan alat atau dasar hukum untuk bertindak, sedangkan delegasi wewenang merupakan kunci dinamika organisasi.

Selanjutnya Hasibuan (2016:64) dalam buku Manajemen Dasar, pengertian, dan masalah mengemukakan sebagai berikut “ Authority adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu; authority merupakan dasar hukum yang sah dan legal yang dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan” .

Menurut Allen dalam Hasibuan (2016:64) “Authority is the sum of the power and right entrusted to make possible the performance of the work delegated” .Artinya : wewenang adalah sejumlah kekuasaan (power) dan hak (right) yang didelegasikan pada suatu jabatan.

Fayol dalam Hasibuan (2016:65)mengemukakan “Wewenang adalah hak untuk memerintah (dalam organisasi formal) dan kekuatan (power) membuat manajer dipatuhi dan ditaati” .

Wewenang (authority) merupakan dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan dalam suatu perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa.dalam authority (wewenang) .selalu terdapat power (kekuasaan)and right (hak), tetapi dalam power (kekuasaan) belum tertentu terdapat authority (wewenang) and right (hak) .

9. Teori Ketentraman Dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta dalam (<http://ringkasteori.blogspot.co.id/2012>) adalah “ tentram ialah aman atau (tidak rusuh,tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran) . Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran) .Selanjutnya tertib ialah aturan peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik” .

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana denganadanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saing menghormati peraturan yang ada, saing mengerti posisi

masing-masing, maka , masyarakat dapat merasa bahwa didalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanyagangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain dalam (<http://ringkasteori.blogspot.co.id/2012>) mendefenisikan bahwa “ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adlah keteraturan, keadaan teratur misanya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan” .

Berdasarkan defenisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, ,emdefinisikan bahwa “ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentrmnan dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan factor dari bidang Ekonomi dan Keuangan.

a. Ketentraman

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

b. Ketertiban

Ketertiban asal kata “tertib” yang berarti teratur, menurut aturan adalah rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya), atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan” atau disamakan dengan ketertiban umum, atau synonym dari istilah “keadilan”. Di setiap etiap aspek kehidupan sudah barang tentu terdapat sebuah aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik maupun agama. Kenapa? Karena dengan adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi lebih tenang, damai, aman, dan sentosa. Bahkan, dengan adanya ketertiban itulah terselenggaralah kehidupan di dunia dan alam semesta ini.

Aturan merupakan sebuah kata yang mempunyai makna sesuatu yang harus dipatuhi. Aturan juga disebut dengan norma. Sebuah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya norma kita dapat membandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Bila norma objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai.

Aturan bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang berjalan tentram, indah, bersih, dan bahagia. Aturan juga terdapat pada Negara yang disebut dengan undang-undang. Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang bersifat mengatur disebut hukum. Dengan adanya hukum itulah terjadi ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Bila hukum tidak ada atau tidak berfungsi, maka akan terjadi hukum rimba. Siapa

kuat dialah yang berkuasa. Tentunya, ini akan berbahaya. Bahaya dari hukum rimba itu adalah anarki, dan kekacauan sosial akan terjadi dimana-mana. Sedikit lebih rendah dari norma, hukum dalam masyarakat juga berlaku sebagai norma sopan-santun yang mencerminkan etika seseorang.

Sesuatu yang bersifat aturan juga terdapat dalam alam semesta. Kita mengenal hukum alam, itulah aturan yang bekerja di alam semesta. Ketertiban alam semesta dikenal di dalam agama Buddha sebagai Niyama artinya Hukum Tertib Kosmis. Sesungguhnya, di dalam segenap bidang kehidupan berlaku aturan dan ketertiban. Ketertiban itu pulalah yang dikuak oleh ilmu pengetahuan lewat teori. Sedangkan hukum-hukum di dalamnya sebagai bidangnya.

Pada tingkat kehidupan materi an-organik berlaku hukum ketertiban fisika yang disebut Utu-Niyama. Pada tingkat organik berlaku hukum ketertiban organik yang disebut Bija-Niyama. Pada tingkat kesadaran dan batiniah berlaku hukum ketertiban jiwa yang disebut Citta-Niyama. Pada tingkat kehidupan dunia yang sulit terinderakan, gaib, dan bersifat spiritual juga ada hukum ketertiban yang terangkum dalam Dharma-Niyama. Dan dalam tingkat perilaku manusia pun memiliki hukum ketertiban yang disebut Karma-Niyama.

Bila dunia semesta saja memiliki ketertiban dan aturan, maka bayangkanlah bila hidup ini tidak ada aturan? Apa yang akan terjadi? Tentunya dunia ini akan kacau dan chaos. Orang akan saling membunuh, saling mencera, saling fitnah. Perampokan, pencurian, penipuan akan merajalela. Tidak ada lagi jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi, tidak ada rasa aman, tidak ada lagi perlindungan terhadap hak milik, tidak ada lagi kebenaran. Semua serba kacau dan orang akan melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya. Tidak ada bedanya antara benar dan salah, tidak ada bedanya antara kebijaksanaan dan keegoisan, antara giat dan malas, antara sukses dan gagal.

Oleh karena itu aturan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena aturan itu akan menciptakan kedamaian, ketentraman. Aturan juga harus jelas, sehingga antara yang menjalankan maupun yang melanggarnya tahu akan akibat dari pelanggaran aturan yang ia lakukan. Ketertiban pada prinsipnya dapat membuat seseorang disiplin, sebab Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, kita berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembnaganan. Ketertiban menurut Madjloes (dalam rauf, 2005 : 6) adalah sebagai asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersamaan.

Ciri-ciri ketertiban menurut Soekanto (2001 : 78) adalah:

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya.
- b. kerjasama.
- c. Pengendalian terhadapkekerasan.
- d. kinsistensi.
- e. Tahan lama.
- f. stabilitas.
- g. hirarki.
- h. kinformitas.
- i. Tidak adanya konflik.
- j. Univormitas atau keseragaman.
- k. Gotong royong.

- l. Didasarkan pada kepatuhan.
- m. Berpegangan pada tahap yang telah ditentukan.
- n. Sesuai dengan pola.
- o. tersusun.

10. Teori Kebutuhan

Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1970 dalam usia 62 tahun. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang Hierarchy of Needs (Hirarki Kebutuhan).

Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Hierarchy of needs (hirarki kebutuhan) dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis (Physiological)

Jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia seperti, makan, minum, menghirup udara, dan sebagainya. Termasuk juga kebutuhan untuk istirahat, buang air besar atau kecil, menghindari rasa sakit, dan seks. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka tubuh akan menjadi rentan terhadap penyakit, terasa lemah, tidak fit, sehingga proses untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dapat terhambat. Hal ini juga berlaku pada setiap jenis kebutuhan lainnya, yaitu jika terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka

akan sulit untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah :

- Kebutuhan untuk makan dan minum
- Kebutuhan seksual
- Kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan (gaji)
- Dan sebagainya

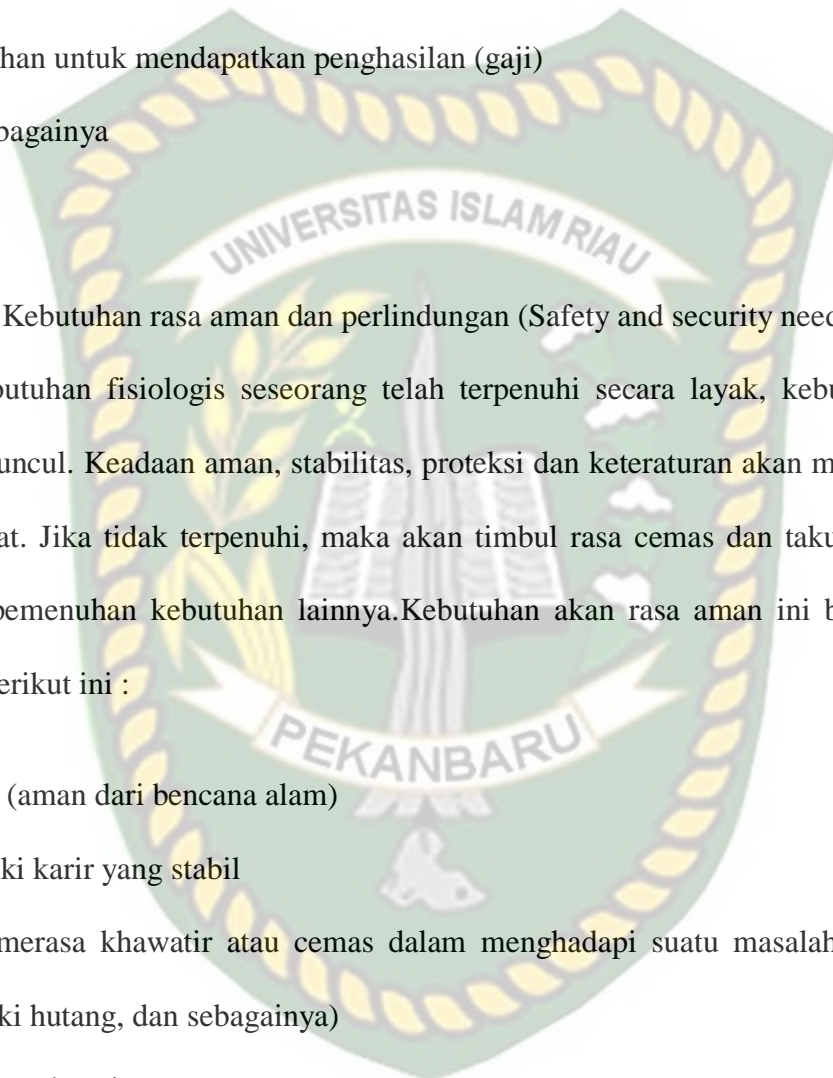
2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (Safety and security needs)

Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah terpenuhi secara layak, kebutuhan akan rasa aman mulai muncul. Keadaan aman, stabilitas, proteksi dan keteraturan akan menjadi kebutuhan yang meningkat. Jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas dan takut sehingga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya. Kebutuhan akan rasa aman ini bisa jadi meliputi beberapa hal berikut ini :

- Rumah (aman dari bencana alam)
- Memiliki karir yang stabil
- Tidak merasa khawatir atau cemas dalam menghadapi suatu masalah (misalnya tidak memiliki hutang, dan sebagainya)
- Dan lain sebagainya

3. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki (love and Belonging needs)

Ketika seseorang merasa bahwa kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi, maka akan mulai timbul kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Hal ini dapat terlihat dalam



usaha seseorang untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, anak, atau bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu seperti tim sepakbola, klub peminatan dan seterusnya. Jika tidak terpenuhi, maka perasaan kesepian akan timbul.

4. Kebutuhan akan harga diri (esteem needs)

Kemudian, setelah ketiga kebutuhan di atas terpenuhi, akan timbul kebutuhan akan harga diri. Menurut Maslow, terdapat dua jenis, yaitu lower one dan higher one. Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti status, atensi, dan reputasi. Sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat timbul perasaan rendah diri dan inferior.

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization)

Kebutuhan terakhir menurut hirarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Menurut Abraham Maslow, kepribadian bisa mencapai peringkat teratas ketika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan bisa memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Beberapa pendapat tentang teori kebutuhan dasar manusia menurut para ahli ;

a. Kebutuhan Dasar Menurut Gardner Murphy

Gardner Murpy menggambarkan kebutuhan itu atas empat kategori, yang terdiri dari:

1. Kebutuhan dasar yang berkaitan bagian-bagian penting tubuh misalnya kebutuhan untuk makan, minum, udara, dan sejenisnya.
2. Kebutuhan akan kegiatan, meliputi kebutuhan untuk tetap bergerak
3. Kebutuhan sensorik yang meliputi kebutuhan untuk warna, suara, ritme, kebutuhan yang berorientasi terhadap lingkungan dan sejenisnya.

4. Kebutuhan untuk menolak sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti rasa sakit, ancaman, ketakutan, dan sejenisnya

b. Kebutuhan Dasar Menurut Erich Fromm

Erich Fromm mengidentifikasi kebutuhan manusia itu berasal dari kondisi keadaannya, yang meliputi:

1. Keterhubungan versus narcissisme
2. Transenden-creativitas versus penghancuran
3. Kekeluargaan versus non kekeluargaan
4. Rasa identitas-individualitas versus konformitas kelompok
5. Kebutuhan pengabdian rasional versus irrasional

c. Kebutuhan Dasar Menurut Knowles

Kebutuhan dasar manusia menurut Knowles yang dapat dijadikan konsep dasar untuk pengembangan program pembelajaran pendidikan non formal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Kebutuhan fisik.*

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling mudah dilihat. Dalam hubungan dengan pendidikan, maka kebutuhan itu meliputi kebutuhan untuk melihat, mendengar, beristirahat.

2. *Kebutuhan bertumbuh.*

Menurut para ahli psikologi dan psikiatri kebutuhan untuk pertumbuhan dan berkembang merupakan kebutuhan yang paling dasar dan universal. Hal ini terlihat pada anak-anak adanya dorongan untuk belajar berbicara, merangkak, berjalan dan tumbuh dengan berbagai cara..

3. *Kebutuhan akan keselamatan*

kebutuhan akan keselamatan mencakup keselamatan fisik dan psikologik seperti perlindungan atas ancaman harga diri..

4. *Kebutuhan akan pengalaman baru*

sementara manusia mencari keselamatan, mereka juga menciptakan ketegangan dalam bentuk petualangan yang mengasyikkan dan penuh risiko.

5. *Kebutuhan untuk dikasihi*

semua orang ingin disukai, meskipun cara yang ditempuh untuk mencapainya kadang-kadang menunjukkan dorongan yang bertentangan.

6. *Kebutuhan untuk dikenal*

setiap manusia merasa perlu untuk dihargai, dipuji dan dihormati oleh orang lain.

Teori Kebutuhan Menurut David McClelland

1. *Need for achievement*

yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggungjawab untuk pemecahan masalah. Seorang yang kebutuhan berprestasinya tinggi cenderung untuk berani mengambil resiko. Kebutuhan untuk berprestasi adalah kebutuhan untuk melakukan pekerjaan lebih baik daripada sebelumnya, selalu berkeinginan mencapai prestasi yang lebih tinggi.

Sebagai manusia, maka pastilah kita semua memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi supaya bisa menjadi seorang manusia yang utuh dan tidak kekurangan. Kebutuhan yang mungkin sudah anda kenal adalah kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier, yang meliputi banyak sekali barang, mulai dari rumah, makanan, dan sebagainya.



Namun demikian, ternyata disamping 3 kebutuhan tersebut, masih ada saja kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi supaya anda bisa menjadi manusia yang utuh.

Tokoh yang mengungkapkan mengenai hal ini adalah Abraham Maslow, yang mana ia memperkenalkan teori mengenai piramida kebutuhan, dimana terdapat 5 kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan paling dasar, hingga kebutuhan tertinggi, dimana seseorang mampu untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara penuh atau menyeluruh, yang dikenal dengan istilah aktualisasi diri.

c. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Berikut penulis paparkan kajian terdahulu

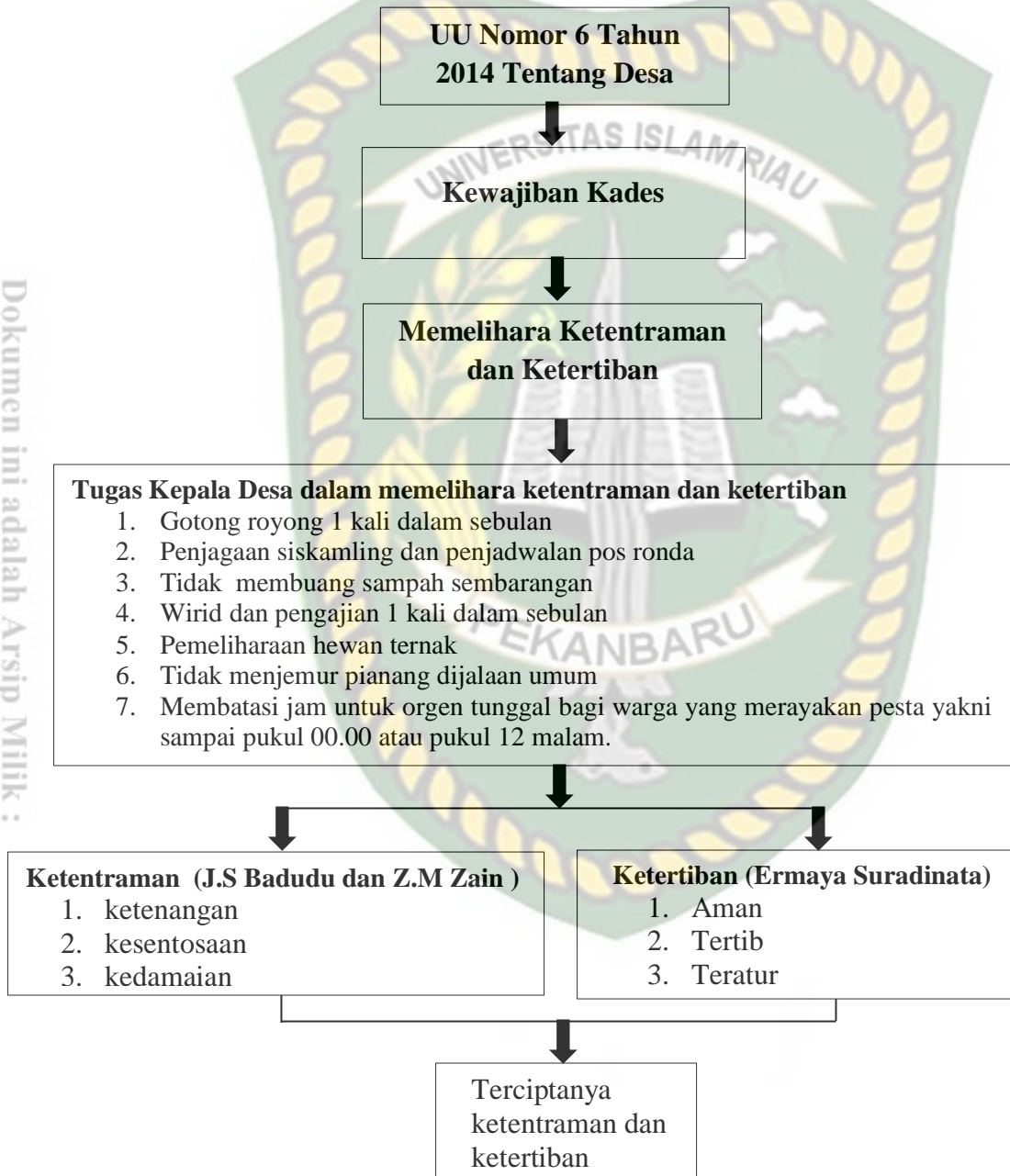
No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahyaruddin	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa (dari 2006-2008) Bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Pengaduh Kecamatan Bungaran Timur Laut Kabupaten Natuna	1. Sama-sama meneliti kewajiban kepala desa yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban 2. Sama-sama menggunakan teori Ndraha	1. Tahun: 2009 2. Metode Deskriptif secara survey, kualitatif
2.	Syhrian	Peranan Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	Sama-sama meneliti tentang ketentraman dan ketertiban	1. Tahun 2011 2. Teori farhan dalam handayanin grat (1985:89)

				3. Lokasi Penelitian di Kecamatan
3.	Deni saputra	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	Sama-sama meneliti mengenai kewajiban kepala desa yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban	1. Tahun 2013 2. Metode Deskriptif secara survey kuantitatif

d. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membentuk serta menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi serta yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kerangka pikir tersebut penulis sajikan seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir



e. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisis dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan bahwa dalam konsep operasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Analisis adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.
2. Pelaksanaan adalah suatu proses yang melaksanakan sesuatu yang harus dikerjakan.
3. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dikerjakan.
4. Kewajiban setiap pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
5. Pelaksanaan kewajiban adalah suatu proses melaksanakan sesuatu hal yang dibebankan kepada seseorang atau sekelompok orang yang harus dikerjakan.
6. Kepala desa adalah kepala pemerintah terendah dalam system ketatanegaraan republic Indonesia yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Sialang Jaya.
7. Ketertiban yaitu aturan yang mengahruskan segala sesuatu supaya berjalan sejalan agar tidak berantakan dan teratur.
8. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman dan nyaman.
9. Membuat pos-pos ronda yaitu kepala desa mengusahakan atau mendirikan pos-pos ronda dan kelengkapannya di setiap RT/RW didesanya dan mengatur perondaan.
10. Mengatur giliran dan mengawasi jalannya perondaan didesa artinya kepala desa mengatur giliran didesa dengan membuat jadwal giliran perondaan dan melakukan pengontrolan langsung ke pos-pos ronda atau menunjukan wakil untuk menggantikan dirinya ketika berhalangan.

11. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saing mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa didalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

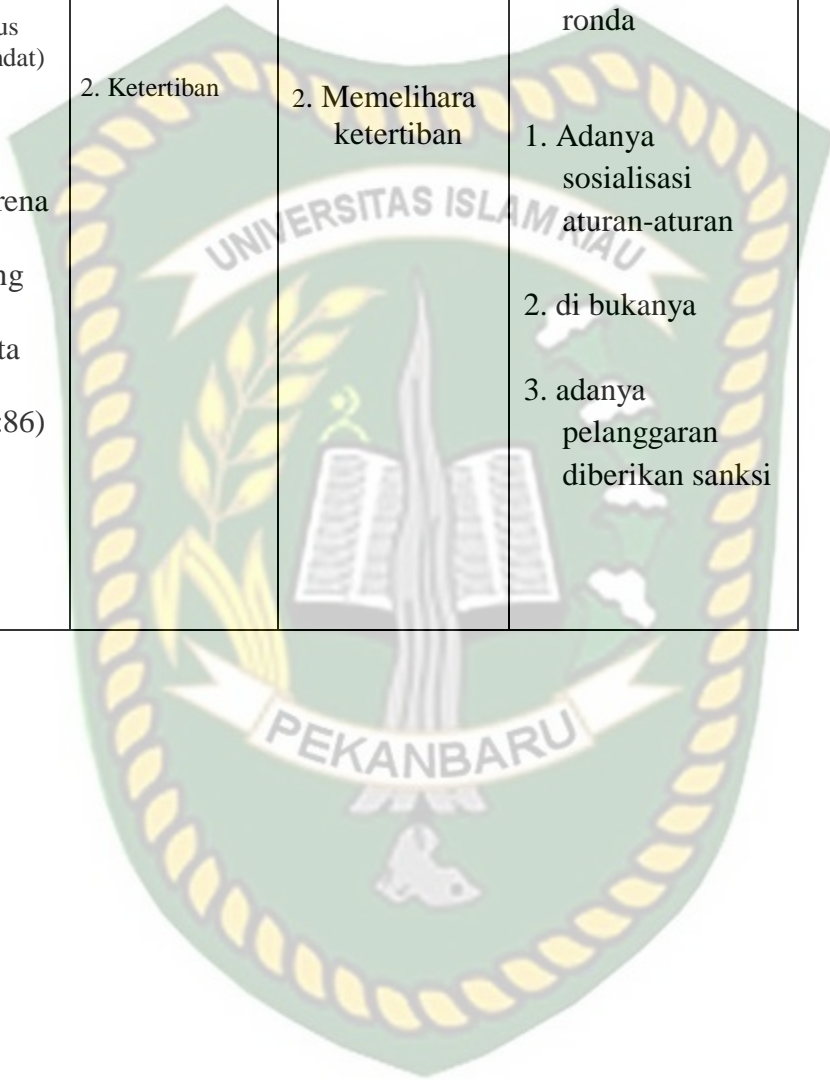


f. Operasional variabel

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sialang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelitian
--------	----------	-----------	-----------------

<p>Kewajiban adalah kewajiban bisa lahir dari perintah, seseorang dapat mendapat tugas wajib menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, ada tiga sumber kewajiban yaitu janji atau commitment, status dan perintah (mandat) .pemerintah berkewajiban melayani masyarakat karena status sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan nyata dan langsung. (Ndraha, 2011:86)</p>	1. ketentraman	1. Memelihara ketentraman	<ol style="list-style-type: none"> 1. diaktifkan ronda-ronda 2. Setiap RT punya pos ronda 3. adanya jadwal ronda
	2. Ketertiban	2. Memelihara ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sosialisasi aturan-aturan 2. di bukanya 3. adanya pelanggaran diberikan sanksi





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau